



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIMPEG
PADA SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2018**

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIMPEG
PADA SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Gambaran Umum

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensipemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat untuk mengembangkan pelayanan kepegawaian berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah didapat, dan tersaji secara interaktif. SimpegSKPD merupakan pengembangan dari Simpeg BKD yang dibentuk dan disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Program Aplikasi SimpegSKPD yang dimaksud dapat beroperasi dalam jaringan Online dengan sistem intranet maupun internet (*Web Based Application*), sehingga dapat digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan secara otomatis. Dengan demikian, dapat dihasilkan informasi yang akurat dan akuntabel dalam pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Guna lebih mengoptimalkan dalam pengoperasian aplikasi dimaksud, perlu disusun suatu kegiatan rapat bimbingan teknis bagi pejabat pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah. Rumusan langkah tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg Pada SKPD Pemprov Jateng Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengoperasian Aplikasi Simpeg Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian.

2. Tujuan

- a. Tersedianya fungsi komunikasi dan penyediaan informasi dalam jaringan interaktif dengan Pengelola Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah
- b. Mempercepat dan mempermudah proses integrasi, pertukaran, pengumpulan dan penyebaran informasi kepegawaian antara OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Terwujudnya tenaga pengolah data pegawai di setiap OPD yang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi;
- d. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- e. Peningkatan kinerja pegawai di tunjang dengan penggunaan aplikasi Simpeg yang baik.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan

dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bintek (bimbingan teknis) serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang pengelola kepegawaian OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. NARASUMBER

- a. Pejabat Pengelola Simpeg Provinsi Jawa Tengah
- b. Pejabat Pengelola Data Kepegawaian BKN Pusat

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

G. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK						■						
2	Bimbingan Teknis							■	■				
3	Konsultasi/Koordinasi				■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Belanja Pengembangan Aplikasi				■								

H. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan simpeg Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme *updating* data Aplikasi Simpeg Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan:

1. Persamaan persepsi dalam pengolahan data pegawai melalui peningkatan kemampuan aparatur Pengolah data, sehingga mampu menjawab segala permasalahan di bidang pengolahan data pegawai yang pada akhirnya memberikan supporting data kepada Pimpinan dalam mengambil keputusan.
2. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke OPD.
3. Menyediakan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan , pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian.
4. Tersosialisasinya Perkembangan Aplikasi Simpeg Provinsi Jawa Tengah

I. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp. 217.000.000 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

J. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpeg pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Semarang, MARET 2018

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG.SH, MM

Pembina

NIP. 197001131989032002